

Buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**Kritik dan Solusi
Implementasi SRG**

**BUMN Diperbolehkan
Hedging Valas?**

**KPK Harus Selidiki
Ekspor Timah Ilegal**

Pasar fisik Online JFX

Referensi Harga Batubara

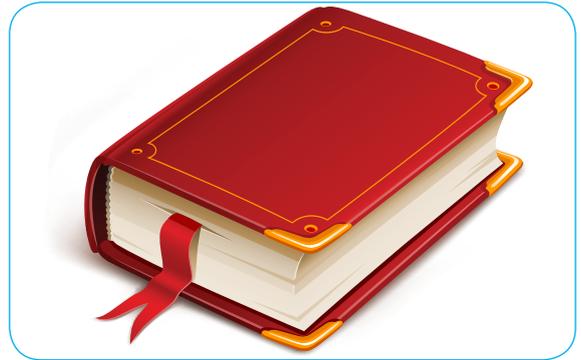


DAFTAR ISI

Berita Utama.....	4-7
- Pasar Fisik Batubara Online JFX Jalan Menuju Penentu Harga Batubara	
Resi Gudang.....	8-10
- Kritik dan Solusi Implementasi SRG	
Berjangka.....	11-13
- BUMN Diperbolehkan Hedging Valas?	
Agenda Foto.....	14-15
Aktualita.....	16-17
- Kemendag Tertibkan Perdagangan Batubara - Gudang SRG Bengkulu Tepat Untuk Komoditi Kopi - Kemendag Terbitkan Revisi Permendag Tentang Ekspor Timah - KPK Harus Selidiki Ekspor Timah Ilegal	
Analisa.....	18
Breaking News.....	19
Info SRG.....	20-21

Forum...22

Pengembangan SRG Hingga 2025



Kolom...23-25

Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui Tentang CFD



Kiprah...26-27

Jadi Pialang Harus Taat Aturan



Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



buletin
Bappebti
BUKTIAN HARGA & PERDAGANGAN KOMODITI

Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggu Jawab
Sutriyono Edi

Pemimpin Redaksi
Junaedi

Wakil Pemimpin Redaksi
Subagiyo

Dewan Redaksi
Natalius Nainggolan, Himawan Purwadi,
Widiastuti, Yuli Edi Subagio,
Yovian Andri, Tomi Setiawan,
Harry Prihatmoko, Poppy Juliyanti.

Sirkulasi
Apriliyanto,
Annisa Fitri Wulandari, Katimin.

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini
dikirim lengkap dengan identitas serta foto
ke E-mail:
buletin@bappebti.go.id



Foto : Sri Nastiti Budianti, menerima jabatan Sekretaris Bappebti dari Junaedi yang ditunjuk menjadi Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen, Kementerian Perdagangan.

Peranan bursa berjangka komoditi sebagai sarana *price discovery*- pembentukan harga dan *hedging*- lindung nilai semakin nyata diperlukan terutama di era perdagangan bebas seperti saat ini. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5 % hingga 6 % per tahun, tentunya fungsi bursa semakin diperlukan.

Sejatinya fungsi bursa tidak semata-mata untuk pembentukan harga, referensi harga dan lindung nilai, melainkan juga menjadi ciri atau *culture* dari sebuah negara yang berdaulat secara ekonomi. Artinya, Indonesia sebagai negara produsen juga menjadi pasar dari berbagai komoditi unggulan yang diperlukan dunia.

1 Juli 2014 bisa dikatakan hari yang bersejarah dalam perjalanan industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Sebab pada tanggal 1 Juli tersebut, Jakarta Futures Exchange- JFX bekerjasama dengan PT Bukit Asam Tbk., meluncurkan perdagangan fisik komoditi batubara secara online.

Meski peserta penjual batubara baru diwakili PT Bukit Asam, tetapi dari sisi pembeli terdapat sebanyak 21 perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal itu dikarenakan perusahaan batubara BUMN ini memiliki market share sekitar 13,5 % dari total produksi nasional. Tentunya dikemudian hari diharapkan pihak penjual batubara di pasar fisik JFX itu semakin banyak. Sehingga likuiditas pasar semakin kompetitif dan transparan.

Tujuan dibentuknya pasar fisik komoditi batubara JFX itu, jelas, untuk menciptakan

harga kompetitif baik bagi pelaku di dalam negeri maupun pasar pengguna di luar negeri. Penciptaan harga itu sangat penting dikarenakan Indonesia berperan sebagai salah satu produsen terbesar di dunia dengan volume produksi sekitar 400 ribu ton per tahun. Dan dari jumlah produksi tersebut, sekitar 80 % diekspor ke berbagai negara.

Di lain pihak, pemerintah pun saat ini mendorong perusahaan BUMN untuk melakukan lindung nilai mata uang asing yang digunakan mengimpor bahan baku atau pun sebagai alat pembayaran. Perusahaan BUMN setiap tahunnya memerlukan mata uang asing yang sangat besar. Sebab itu, untuk menekan risiko fluktuasi mata uang asing perusahaan BUMN memerlukan sarana lindung nilai.

Namun sikap pemerintah mengizinkan perusahaan BUMN melakukan lindung nilai mata uang asing, perlu dipertegas mekanismenya dilakukan di mana. Sebab, mengacu pada Undang-undang No 32 Tahun 1997 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 2011, tentang perdagangan berjangka komoditi, mekanisme lindung nilai hanya bisa dilakukan melalui bursa berjangka.

Untuk itu, perlu ada kesepakatan bersama di antara lembaga pemerintah dalam menentukan mekanisme lindung nilai perusahaan BUMN. Jangan sampai di awal tujuannya mulia, tetapi kemudian berbenturan dengan kepentingan-kepentingan sesaat.

Selamat Idul Fitri 1435 H.
Mohon Maaf Lahir dan Batin.
Salam Redaksi!



Pasar fisik Online JFX

Referensi Harga Batubara



Menyandang gelar negara produsen dan eksportir batubara nomor wahid, Indonesia siap menjadi sumber referensi harga baik bagi pelaku pasar domestik maupun mancanegara. Kok, bisa?

Ada secercah harapan untuk menjadi menjadikan Indonesia sebagai acuan harga batubara lokal maupun dunia. Hal itu tampak pada Selasa, 1 Juli 2014, lalu, Jakarta Futures Exchange (JFX) menggandeng PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang telah meluncurkan pasar fisik batubara *online*. Hadir saat peluncuran pasar fisik batubara JFX tersebut, diantaranya Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Sutriono Edi, Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, R. Sukhyar, Direktur Utama Bukit Asam Milawarma,

dan tentunya Direksi JFX.

Perdagangan pasar fisik batubara ini dibangun dan diatur serta diawasi oleh Bappebti, sehingga semua pelaku harus mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan untuk menjaga transaksi yang *fair* dan transparan. Demikian antara lain dikatakan Kepala Bappebti, Sutriono Edi, saat menyampaikan sambutannya pada peluncuran perdana Pasar Fisik Batubara Online di Kantor JFX.

“Perdagangan fisik batubara online ini harus diapresiasi sebagai wujud pengelolaan batubara yang akuntabel, transparan



dan terorganisir," kata Sutriono Edi.

Hadirnya pasar ini, menyimpan banyak manfaat. *Pertama*, kata Sutriono, pemerintah memiliki 13,5 % dari jumlah produksi perusahaan penambang batubara di Indonesia. Dengan kepemilikan itu, seharusnya pemerintah dapat menjual melalui mekanisme perdagangan fisik di bursa berjangka. Artinya, batubara milik pemerintah tidak lagi ditiptkan kepada produsen batubara.

"Dengan begitu pemerintah dapat menjadi lokomotif perdagangan fisik batubara secara transparan sehingga dapat memiliki referensi harga yang terpercaya," katanya.

Kedua, pembentukan dan penyebaran perkembangan informasi harga batubara akan mudah dilakukan ke para pelaku pasar. *Ketiga*, sebagai salah satu alternatif sumber referensi harga ke pelaku pasar batubara yang selama ini mengacu ke luar negeri. "Ke depannya Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi referensi harga batubara secara lokal tapi akan menjadi referensi harga batubara dunia," harapnya.

Lebih jauh dikatakan Sutriono Edi, manfaat pasar fisik batubara JFX yang *ke-empat* yakni, penentuan standarisasi mutu batubara yang dapat diterima seluruh pelaku pasar batubara.

Direktur Utama PTBA, Milawarma, juga mengatakan hal yang senada. Dikatakan, perdagangan fisik batubara online ini akan membawa banyak manfaat bagi industri pertambangan batubara. Diantaranya, akan membantu mengatur tata niaga batubara dengan lebih baik lagi.

Sistem Online

Indonesia selama ini hanya memiliki referensi harga batubara untuk penyerahan langsung atau satu bulan ke depan yang mengacu kepada Indonesian Coal Index- dikeluarkan Coalindo Energy. Harga Batubara Acuan (HBA) dan Harga Pedoman Batubara (HPB)- dikeluarkan Pemerintah.

Dengan masuknya batubara PTBA dalam perdagangan fisik batubara online



Dirjen PT Bukit Asam, Milawarma

ini, diharapkan terbentuk referensi harga batubara untuk periode di atas satu bulan ke depan, yang mencakup tiga bulan, enam bulan, satu tahun ke depan, dan seterusnya.

Direktur Utama JFX, Sherman Rana Krishna, mengatakan, Indonesia memerlukan referensi harga batubara untuk penyerahan pada periode tertentu ke depan, supaya nilai kontrak batubara jangka panjang lebih akurat. "Karena itu, kami kemudian membuat sistem perdagangan fisik batubara online dengan penyerahan kemudian (*Online Physical Coal Trading with certain delivery period*)," terangnya.

Penggunaan sistem online digunakan untuk memudahkan akses dari semua tempat. Pasalnya, konsumen batubara kebanyakan berasal dari luar negeri. "Sistem online membuat perdagangan batubara menjadi lebih fair, transparan dan wajar," kata Sherman.

Hal lainnya, mekanisme lelang online ini akan memangkas biaya marketing baik dari sisi penjual maupun pembeli, serta dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam pengawasan perdagangan batubara dan menekan ruang gerak legal mining. Mekanisme perdagangan yang



Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Sukhyar

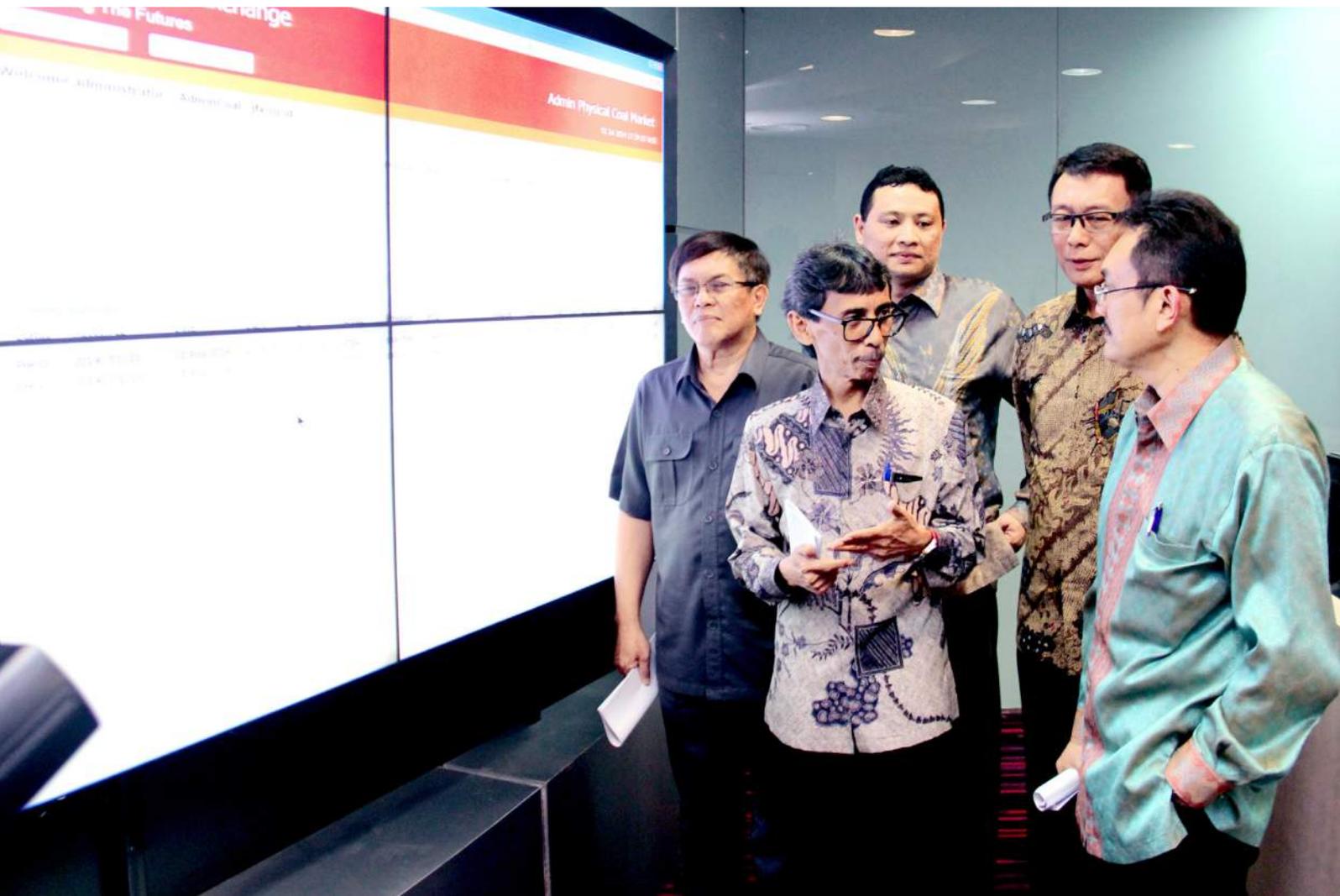
digunakan, mirip dengan lelang e-bay internasional atau lelang tertutup, namun disesuaikan dengan perdagangan nyata batubara di Indonesia.

Di sisi lain Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo menambahkan, "sistem dan infrastruktur yang kami kembangkan bersama-sama dengan PTBA lebih *advance*. Saat ini sistem perdagangan fisik online batubara tersebut ditujukan untuk PTBA dengan para calon pembelinya. Produsen batubara lain yang berminat melakukan lelang secara online menggunakan sistem ini dapat bekerja sama dengan JFX."

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Sukhyar mengapresiasi sistem perdagangan baru tersebut. Menurutnya, hal tersebut bisa mempermudah pengawasan batubara di Indonesia.

Dengan sistem online, semua pembelian bakal tercatat dan dapat dilacak historisnya. Karena itu, dia mengimbau perusahaan tambang untuk mengikuti jejak PTBA untuk memperdagangkan batubaranya di JFX

"Kami sendiri tidak bisa memaksa pengusaha untuk menjual melalui sistem ini. Tapi kami tetap mengimbau agar mereka mau masuk. Khususnya 37 perusahaan



pemegang PKP2B untuk masuk ke pasar ini. Kan *buyer* di sini akan merasa terjamin dengan keabsahan *seller*,” jelasnya.

Lelang Perdana

Saat ini PTBA masih menjadi satu-satunya perusahaan yang bertindak sebagai penjual (*seller*) di pasar fisik batubara *online* JFX. Untuk pembelinya (*buyers*) ada 16 perusahaan baik dari di dalam negeri maupun dari luar negeri. Diantaranya, tujuh perusahaan yang berada di Indonesia, empat perusahaan di Tiongkok, dua perusahaan di Malaysia dan sisanya masing-masing satu perusahaan dari Jepang, Hong Kong, dan Singapura.

Pada tahap awal lelang (*create auction*) perdana, PTBA menawarkan 75.000 ton produk batubaranya. Masing-masing 60.000 ton (BA-70 HS) dengan kalori 7.000 kcal/kg (ADB) untuk pengapalan bulan September dari Pelabuhan Tarahan di Bandar Lampung, dan 15.000 ton (BA-63) dengan kalori 6.300 kcal/kg (ADB). Sedangkan lelang secara *online* dijadwalkan akan dibuka 21 Agustus 2014 mendatang.

PTBA akan meningkatkan volume produknya secara bertahap untuk diperdagangkan di JFX, sesuai dengan pertumbuhan volume angkutan batubara dari lokasi tambang menuju pelabuhan

pengiriman. Karena pada saat ini, dari hampir 20 juta ton dari total produksi PTBA sudah hampir *full committed*.

Mulai tahun 2015, kapasitas angkutan kereta api akan meningkat menjadi 22,7 juta ton per tahun. Selain itu, PTBA juga akan terus meningkatkan kapasitas produksi dan kapasitas transportasinya untuk memenuhi permintaan pasar serta pemenuhan kontrak jangka menengah dan panjang dengan sejumlah perusahaan domestik.



Mekanisme Transaksi

Kepala Bappebti, Sutriono Edi, dalam paparannya kembali menjelaskan mekanisme lelang yang digunakan JFX yakni inisiasi lelang dengan paket lelang keseluruhan. Dengan mekanisme lelang seperti itu, transaksi yang dilakukan para pelaku pasar fisik batubara *online* di JFX, sebagai berikut, *pertama*, bursa langsung melakukan alokasi transaksi dan mengumumkan hasil perdagangan kepada penjual dan pemenang lelang melalui sistem transaksi *online*. Informasi alokasi memuat informasi penjual, informasi pemenang lelang, jumlah lot, harga dan pelabuhan muat.

Kedua, setelah menerima informasi dari bursa mengenai hasil perdagangan, penjual dan pemenang lelang membuat kontrak jual beli (letter of intent) setelah informasi dari bursa diterima.

Ketiga, setelah menerima informasi alokasi perdagangan dari bursa, penjual wajib menyampaikan copy L/C (SKBDN) yang diterima dari pemenang lelang kepada bursa sebelum periode pengiriman melalui sistem transaksi *online*.

Ke-empat, atas dasar copy L/C yang diterima bursa, pemenang lelang akan melakukan pembayaran sesuai dengan L/C yang diserahkan kepada penjual.

Dalam pelaksanaannya, pasar fisik batubara terorganisir memiliki komite batubara. Komite batubara ini adalah dari perwakilan pemangku kepentingan pasar fisik batubara yang berhak mewakili atau yang ditunjuk secara tertulis oleh pihak-pihak terkait. Tapi, tidak terbatas atas peserta penjual, peserta pembeli, dan instansi terkait.

Adapun kualitas batubara yang diperdagangkan di pasar fisik batubara adalah batubara yang memiliki *calorific value* minimal 5500 kkal/kg *air dried base* (adb) atau setara dengan 4550 kkal/kg as received (ar). "Untuk satuan lotnya yaitu 1 lot sama dengan 1 ton," jelas Sutriono.



Eksportir Thermal Coal

Batubara menjadi komoditi energi yang semakin penting karena kenaikan harga minyak bumi. Permintaannya melonjak seiring dengan bertambahnya permintaan energi dunia. Terkait itu, Sutriono Edi mengatakan, ketersediaan sumber daya batubara Indonesia sekitar 168 miliar ton, sementara cadangan terbukti 28 miliar ton.

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai produsen batubara di dunia dengan produksi sebesar 400 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 % batubara Indonesia menjadi komoditi ekspor. Adapun tujuan ekspornya meliputi China, India, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Kawasan Eropa seperti Spanyol dan Italia.

Di dunia, negara produsen batubara pertama terbesar adalah China dengan jumlah produksi sebesar 3,6 miliar ton. Tapi, produksinya dipakai di dalam negeri karena memang besar sekali kebutuhannya. Di posisi kedua, Amerika Serikat dengan produksi sekitar 800 juta-1 miliar ton. Produksinya kebanyakan dipakai di dalam negeri, hanya sedikit yang diekspor. Jadi, Indonesia dikenal sebagai

eksportir batubara terbesar pertama di dunia. "Kita tercatat sebagai eksportir *thermal coal* (batubara termal) terbesar," papar Sutriono.

Hingga saat ini permintaan pasar batubara terus meningkat seiring dengan permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga, bisnis pertambangan komoditas ini di Indonesia semakin berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. "Ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah perusahaan tambang maupun produksinya," ungkapnya.

Karena itu, lanjut Sutriono, batubara sebagai komoditas tidak terbarukan, perdagangannya di Indonesia harus diatur dan dikelola dengan baik melalui peningkatan daya saing. "Sehingga keuntungan ekonomi, manfaat bisnis dan kelestarian dapat dinikmati dalam jangka panjang."

Sementara dengan lahirnya pasar fisik batubara online di JFX, Sutriono berharap agar pelaku pasar dan semua pihak yang terlibat di dalamnya, bersedia menjalankan transaksi dengan mematuhi aturan yang ada. "Diharapkan juga ke depannya tidak hanya PTBA saja yang menjadi penjual, tapi juga perusahaan-perusahaan batubara lain yang beroperasi di Indonesia," pungkash Sutriono Edi. 



Kritik dan Solusi Implementasi SRG

“Ada empat pertanyaan yang akan saya ajukan terkait Sistem Resi Gudang (SRG),” ujar Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, melontarkan bahan diskusi.

Demikian pembukaan pidato Wamendag Bayu dalam Workshop SRG, di Hotel Arya Duta, Jakarta, 14 Juli 2014 lalu. Pertanyaan itu menjadi arahan diskusi bagi 80 peserta yang hadir baik itu dari instansi pemerintah, akademisi dan stakeholder SRG.

Bayu mengungkapkan bahwa, pertanyaan yang diajukan merupakan pandangan dan penilaiannya yang sifatnya sentimental. Pasalnya, dia merasa ikut melahirkan dan mengurus lahirnya SRG sejak awal.

“Apa yang kita bayangkan dengan SRG, kenyataannya tidak dapat terjadi pada saat ini. Oleh sebab itu ada empat pertanyaan yang akan saya ajukan,” ujarnya. “Dan kalau kita dapat menjawab empat pertanyaan ini, harapannya kita dapat lebih menjelaskan apa yang akan kita lakukan ke depan.”

Pertanyaan pertama, SRG ini bisnisnya apa? Jika dilihat pembentukan awalnya,

SRG merupakan instrumen tunda jual. Oleh karena itu kata Bayu, dalam produk pertanian, secara alami, harga akan jatuh ketika musim panen dan harga akan naik pada musim paceklik.

“Kalau selisih harga antara panen dan paceklik itu, misalnya 20 %, maka petani lebih baik menyimpan dulu produknya di gudang SRG, dengan harapan ke depannya akan naik 20 %.” Dan untuk itu, petani harus membayar biaya SRG. Jika pembiayaan itu mencapai 10 %, maka petani masih diuntungkan 10 %. “Apakah itu terjadi pada saat ini? Dan kalau selisih harga tidak terjadi sebesar itu, bagaimana kita membisniskan SRG?”

SRG ini, lanjut Bayu, ada biayanya dan harus ada yang menanggung biayanya. Tapi kalau ada insentifnya, nanti akan ada selisih harga, maka disitulah menjadi bisnis berjalan. “Pertanyaannya mungkin bisa diperdalam, pada komoditas apa selisih harga itu terjadi, sehingga SRG ini



masih bisa menjadi bisnis?"

Selama ini, pemerintah telah membangunkan gudang SRG. Padahal, pengelola gudang mestinya dapat membangun gudang SRG itu secara mandiri untuk kepentingan bisnisnya. "Kalau pemerintah harus menanggung semuanya, mulai dari membangun gudang, menggaji pengelola gudang, mensubsidi bunga, lantas ide awal SRG sebagai tunda jual berarti tidak jalan dong," papar Bayu.

Pertanyaan kedua, apa tujuan SRG? "Apakah mendapatkan keuntungan dari tunda jual, atau tujuannya memberikan nilai tambah pada produk yang disimpan. Misalnya diolah dulu, dikeringkan dan di-packaging, sehingga dapat bernilai tambah. Atau mungkin SRG menjadi bagian sistem logistik?"

Bank Indonesia, kata Bayu, mengatakan, SRG itu bagus untuk stabilisasi harga. Hal itu bisa saja terjadi, jika gudang SRG sudah banyak tersebar dan memiliki komoditas yang banyak. "SRG bisa saja menjadi stabilisasi harga. Tapi apa itu tujuannya? Atau ada dulu dalam pembahasannya, SRG tujuannya menjadi alternatif dari tengkulak. Karena tengkulak bisa memberikan uang terlebih dahulu ke petani," ungkap Bayu.

Pertanyaan ketiga, apa peran yang diharapkan dari SRG untuk perekonomian? "Termasuk di dalamnya perekonomian petani atau perekonomian untuk komoditas pokok atau perekonomian daerah. Jadi peranan SRG itu apa?" tanya Bayu.

Pertanyaan ke-empat, "Apa langkah yang harus dilakukan, agar peran SRG dan tujuannya dapat tercapai?" tanya Bayu kembali. "Dan jangan lupa, jangan hanya mengatakan pemerintah harus peduli, itu tidak cukup. Kita harus konkrit, kalau dengan regulasi, regulasi apa yang akan kita buat? Kalau dengan APBN, APBN apa yang akan kita sediakan?"

Dengan empat pertanyaan itu, Bayu berharap, semua pihak terkait dapat bersama-sama mencari solusi untuk memaksimalkan potensi SRG. Meskipun, kata



Bayu, Pertemuan itu terlalu singkat dan tentunya diperlukan kembali duduk bersama untuk pembahasan lebih mendalam. "Pastinya kita harus bertemu lagi."

Sejalan dengan Wamendag Bayu Krisnamurthi, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Sutriono Edi, mengatakan, diperlukan solusi dalam rangka mempercepat implementasi SRG. "Jadi bagaimana kita mendapatkan masukan dari teman-teman, bagaimana SRG yang sudah diundangkan pada tahun 2006 dan telah diamandemen, bisa dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar," kata Sutriono kepada peserta yang merupakan perwakilan dari pemangku dan pelaku terkait SRG, baik itu dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, pengelola gudang SRG, dan lainnya.

Solusi

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP), Kementerian Perdagangan, Tjahya Widayanti, dalam pemaparannya menjelaskan kendala dan solusi dalam pengembangan implementasi SRG. Menurutnya, ada beberapa kendala yang dihadapi. Antara lain, kurangnya pemahaman SRG, fasilitas gudang belum memadai, terbatasnya pengelola gudang SRG, kualitas komoditi hasil panen petani

di bawah standar mutu yang diharapkan, dan cepatnya perputaran atau mutasi pejabat daerah yang membidangi SRG. "Selain itu, pemasaran komoditi yang masih terbatas dan perilaku petani masih tradisional," ungkap Widayanti.

Dengan kendala di atas, dia menjabarkan beberapa solusi penting untuk mengembangkan implementasi SRG. Antara lain, perlunya sosialisasi dan pertemuan teknis SRG dan peningkatan literasi pada petani, pelaku usaha, pihak perbankan dan pemerintah daerah; Penyediaan skema subsidi SRG dan pemanfaatan gudang swasta atau BUMN; Adanya amandemen UU No. 9 Tahun 2006 terkait Lembaga Jaminan dan efisiensi LPK; Pengadaan mesin pengering (dryer) dan rice milling unit di gudang SRG; MOU dan kerjasama dengan kementerian/lembaga, universitas/akademisi dan stakeholders terkait; pelatihan, bimbingan teknis dan penyusunan POB bagi calon pengelola gudang dan UKM; dan Penyediaan sistem informasi transaksi dan harga.

"Selain itu diperlukan juga pelatihan calon pengelola gudang dan tenaga pengujian mutu barang serta pembentukan tim POKJA SRG dan pengawasan secara online," papar Widayanti. "Dengan langkah-langkah itu akan terwujud SRG yang handal dan berkelanjutan."



Master Plan SRG

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian, Universitas Lampung, Bustanul Arifin, di dalam acara itu juga ikut menyoroti sekilas master plan SRG tahun 2014-2019. Dia mengatakan, SRG dalam pelaksanaannya telah mengalami perkembangan. Menurutnya, SRG yang sudah mulai diapresiasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjadi salah satu instrumen pengukuran ketersediaan stok daerah dan nasional, untuk komoditi beras, gabah dan jagung.

Selain itu, Bappebti dan Pusat Registrasi SRG telah mengembangkan data ketersediaan stok di setiap gudang SRG yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE). "Sistem informasi

ini untuk mempercepat pengambilan keputusan kebijakan, penyebaran dan penyediaan bahan pangan di daerah-daerah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional," jelasnya.

Tapi, lanjut Bustanul, data pada IS-WARE masih terbatas pada gudang-gudang dalam SRG dan belum terintegrasi dengan gudang di luar SRG. "Apabila sistem informasi ini telah terbukti semakin efektif, maka upaya perluasan cakupan wilayah SRG perlu untuk terus dilakukan."

Bustanul juga memaparkan peluang dan perbaikan SRG ke depannya. Dia memaparkan bahwa, SRG merupakan salah satu sumber alternatif pembiayaan, upaya lindung nilai tahap awal, dan kontributor bagi ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

Dari kacamata, tantangan yang dihadapi SRG masih banyak, setidaknya menemukan skema alternatif dan inovatif. "Tidak hanya model gabah dan beras atau yang hanya fokus pada pengelolaan gudang semata. Misalnya, SRG untuk komoditi rumput laut, kakao, dan kopi perlu diintegrasikan dengan skema pengolahan produk."

Lainnya, yakni model PT POS Indonesia yang mengembangkan SRG dari hulu sampai hilir: mulai dari benih, pupuk, pengelolaan gudang, transportasi, pemasaran, dan biaya khusus.

"Dan yang perlu menjadi catatan penting yakni tantangan SRG ke depannya. Yakni SRG harus terintegrasi dengan pasar lelang agro dan perdagangan berjangka komoditi," pungkas Bustanul. 

Volume dan Nilai Komoditi SRG (2008 s.d 7 Juli 2014)

Komoditi	Penerbitan			Digunakan	
	Jumlah Resi gudang	Volume Komoditi (ton)	Nilai Barang (Rp)	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)
Gabah	1.401	55.637,89	272,6 Milyar	1.192	166,41 Milyar
Jagung	65	4.621,36	15,02 Milyar	44	9,08 Milyar
Beras	81	5.022,47	35,8 Milyar	71	21,93 Milyar
Kopi	14	20,39	907,2 Juta	10	150,8 Juta
Rumput Laut	12	420	3,47 Milyar	7	1,09 Milyar
Total	1.573	65.722,11	327,86 Milyar	1.324	198,68 Milyar

Rekapitulasi Transaksi Dalam Sistem Resi Gudang 2008 - 2014

Tahun	Penerbitan			Digunakan		
	Jumlah Resi gudang	Nilai Barang (Rp)	%*	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)	%*
2008	16	1,4 M		6	0,3 M	
2009	13	0,5 M	- 61%	5	0,1 M	- 44%
2010	57	5,6 M	1.469%	35	4,2 M	2.982%
2011	271	40,0 M	362%	218	24,0 M	470%
2012	379	93,1 M	133%	332	58,45 M	143%
2013	532	108,94 M	15%	441	66,21 M	13%
2014*	305	74,99 M	-	280	44,3 M	-
Total	1.573	65.722,11		1.324	198,68 Milyar	

*) sampai dengan 7 Juli 2014

Sumber: Bappebti, Kementerian Perdagangan



BUMN Diperbolehkan Hedging Valas?

Transaksi valas BUMN harus memenuhi beberapa syarat, yaitu konsisten, konsekuen dan akuntabel sesuai peraturan dan perundang-undangan. Siapa lembaga pengawasnya?

Sejumlah lembaga penting di tanah air pada 19 Juni 2014, lalu, menentukan strategi dan kebijakan yang memperbolehkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan lindung nilai- *hedging* valuta asing. Langkah BUMN melakukan hedging valas dikarenakan kebutuhan yang sangat tinggi terhadap mata uang asing untuk kepentingan usahanya.

Terkait itu, Bank Indonesia sebagai promotor telah berulang kali melakukan pertemuan dengan sejumlah lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus

(Jampidsus), Deputy Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga Bank Indonesia (BI). Dan dalam pertemuan akhir itu, BUMN diperbolehkan melakukan lindung nilai asal memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Dan salah satu keputusan yang tak kalah penting adalah *hedging* valas yang dilakukan BUMN dan berujung terjadinya risiko kerugian tidak dikategorikan sebagai kerugian negara.

Demikian antara lain dikemukakan Ketua Task Force Pendalaman Pasar Keuangan, Bank Indonesia, Treesna W. Suparyono, saat berbincang dengan

media di Jakarta, pada 19 Juni 2014 lalu. "Rakor mengenai *hedging* ini dilakukan lantaran pelaksanaan transaksi lindung nilai oleh perusahaan BUMN masih sangat rendah. Bahkan, BI mencatat, dari ratusan perusahaan BUMN, hanya ada dua perusahaan BUMN yang telah melakukan transaksi hedging."

"Rendahnya transaksi *hedging* perusahaan BUMN lantaran terdapat kekhawatiran jika terjadi kerugian dalam transaksi tersebut maka negara akan merugi," jelas Treesna.

Sehingga dengan adanya rakor kali ini, tambahnya, agar ada pemahaman yang sama dari pemerintah, aparat penegak hukum dan auditor mengenai kerugian



yang terjadi dalam transaksi *hedging*.

Menurut Treesna, transaksi *hedging* dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengurangi risiko nilai tukar yang bisa kapan saja terjadi. Atas dasar itu, adanya transaksi *hedging* dapat memberikan kepastian dalam nilai tukar tersebut. Dari data yang ada di BI, transaksi valuta asing (valas) Indonesia termasuk yang terendah di negara-negara kawasan. Bahkan, transaksi valas di Indonesia hanya sebesar US\$ 5 miliar per hari. Angka ini jauh dari negara tetangga seperti Singapura yang transaksi valasnya bisa mencapai sebesar US\$ 300 miliar per hari. Lebih jauh dijelaskan Treesna, dari jumlah transaksi valas BUMN itu, sekitar 70 % diantaranya dibeli secara langsung di pasar spot. Sedangkan 20 % dibeli dengan cara *swap* dan sisanya 10 % dibeli dengan cara *forward* dan *option*. "Sebab itu, jika transaksi *hedging* dapat dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD dan pemerintah, maka akan terjadi peningkatan transaksi valas di Indonesia."

Syarat

Melihat potensi yang demikian besar akan kebutuhan valuta asing bagi perusahaan-perusahaan BUMN, karenanya Rakor memutuskan dan menyepakati bahwa transaksi *hedging* diperlukan. Di samping itu, jika terjadi kerugian dalam transaksi *hedging* valuta asing, maka Rakor bersepakat bahwa hal tersebut bukanlah kerugian negara sepanjang transaksi tersebut dilaksanakan dengan konsisten, konsekuen dan akuntabel sesuai perundang-undangan. Rakor juga sepakat, jika terjadi kerugian dalam transaksi *hedging*, maka kerugian tersebut akan ditanggung dari APBN di tahun berjalan. Atas dasar itu pula, Rakor berencana akan membentuk tim teknis yang terdiri dari instansi yang hadir dalam Rakor, dan bertugas untuk meninjau ketentuan mengenai *hedging* hingga memperjelas aturan pelaksanaannya dan melakukan sosialisasi.

"Tim itu juga yang nantinya menyusun apakah klausul kerugian *hedging* bukan



Anggota Komisi VI DPR-RI, Hendrawan Supratikno

kerugian negara dimasukkan ke dalam sebuah aturan atau tidak," ujar Treesna. Sementara itu, Ketua BPK, Rizal Djalil, yang dikutip dari laman BPK menegaskan bahwa Rakor ini bertujuan menyamakan sudut pandang terhadap transaksi *hedging* utang pemerintah dan kewajiban valas BUMN khususnya terkait kerugian yang timbul akibat selisih kurs dalam pelaksanaan *hedging*, serta mendorong adanya kebijakan pencegahan kecurangan sebagai akibat dari implementasi transaksi lindung nilai utang pemerintah.

"Rakor menilai, dalam tiap transaksi *hedging*, terdapat konsekuensi biaya. Tetapi sepanjang transaksi dilakukan dengan konsisten, konsekuen, dan akuntabel sesuai perundang-undangan, maka biaya itu bukan merupakan kerugian negara," jelas Rizal.

Rapat juga menghasilkan kesepakatan bahwa implementasi kebijakan lindung nilai diharapkan membuat pembayaran utang luar negeri tidak terganggu oleh pelemahan rupiah terhadap mata uang asing, tambah Rizal. "Namun, implementasi ini juga bisa menimbulkan kerugian karena selisih kurs walaupun nilainya tidak sebesar jika tanpa dilakukan *hedging*." "Dalam rapat juga dibahas bahwa regulasi untuk melakukan *hedging* sudah ada, namun ada potensi saling tumpang tin-



Kepala Bappebti, Sutriyono Edi

dih," kata Rizal.

Sebab itu, kata Rizal Djalil, masih dibutuhkan peninjauan regulasi. Sehingga Rakor juga menyepakati pembentukan tim teknis untuk melakukan peninjauan ketentuan dan memperjelas aturan pelaksanaannya serta melakukan sosialisasi.

Koordinasi

Menanggapi diberinya kesempatan bagi BUMN untuk lakukan *hedging* valas, Anggota Komisi VI DPR-RI, Hendrawan Supratikno, menyarankan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Kemenkeu harus berkoordinasi dengan Kemendag yang dalam hal ini membawahi Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sebagai otoritas perdagangan berjangka komoditi (PBK) sebagaimana diamanatkan UU No. 32 Tahun 1997 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 2011," tegas Hendrawan.

Hendrawanpun setuju jika BUMN dapat melakukan *hedging* valas. "Ini penting untuk menyelamatkan sektor keuangan BUMN dalam menekan tingkat kerugian dari fluktuasi nilai tukar rupiah, karena hampir 70 % kebutuhan dolar digunakan untuk impor bahan bakar," ucapnya.

Tapi, menurutnya, risiko kerugian akibat hedging tidak semestinya ditanggung oleh negara melalui APBN. "Tidak bisa dong kalau harus dibebankan APBN. Justru itu, direktur-direktur keuangan BUMN harus lihai, jangan kalah dengan pihak swasta," tegasnya.

Hendrawan juga menyarankan agar Kementerian BUMN melakukan hedgingnya di bursa berjangka yang saat ini sudah ada di Indonesia, yakni Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI).

"Kementerian BUMN juga harus berkoordinasi dan memiliki kesadaran kolektif untuk melakukan lindung nilai di bursa yang ada," ujar Hendrawan Supratikno.

Tidak Dilibatkan

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti, Sutriono Edi, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini kepada **Redaksi Buletin Bappebti**, mengatakan, menyambut positif langkah BUMN melakukan hedging valas. Sehingga risiko dari fluktuasi kurs valuta asing dapat ditekan, terutama disaat BUMN melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri.

"Ini langkah maju didalam memberi kebebasan BUMN melakukan hedging valas. Karena tingkat kebutuhan BUMN terhadap valas sangat tinggi, seperti impor bahan baku atau pun BBM," jelas Sutriono Edi.

Namun Sutriono Edi mengaku belum mengetahui apakah BUMN itu melakukan hedging di pasar *spot*, *forward*, *futures* atau pun SWAP.

"Kami belum mengetahui BUMN itu akan bertransaksi valas di pasar yang mana. Karena sejak wacana ini dicetuskan, Bappebti belum pernah diundang untuk membahasnya," jelas Sutriono Edi. Pada hal, tambahnya, dari sisi konstitusi yang ada, hanya Bappebti yang memiliki kewenangan mengawasi dan membina pasar hedging. Terutama transaksi hedging valas dengan penarikan margin. "Un-



Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo

dang-undang No. 10 Tahun 2011, tentang perdagangan berjangka komoditi, jelas ditegaskan bahwa Bappebti merupakan lembaga berwenang mengawasi perdagangan berjangka komoditi. Dan hedging itu merupakan salah satu mekanisme dalam perdagangan berjangka komoditi."

"Jadi kita belum tahu di pasar mana nantinya BUMN melakukan hedging valas dan siapa lembaga pengawasnya. Kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangannya," imbuh Sutriono Edi.

Bursa

Manajemen bursa berjangka ketika diminta tanggapan terkait rencana BUMN akan melakukan hedging valas, menyambut positif rencana tersebut. Direktur Jakarta Futures Exchange (JFX), Bihar Sakti Wibowo, mengatakan, sistem transaksi JFX sudah siap. Dan lagi JFX didukung oleh lembaga kliring yang juga berbadan hukum BUMN yakni PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). "Sehingga trust untuk melakukan transaksi hedging valas itu akan tumbuh dari perusahaan BUMN."

Dari kacamata Bihar menilai, jika BUMN melakukan hedging valas, akan memaksimalkan fungsi bursa berjangka sebagai sarana hedging. "Tetapi yang terpenting pemerintah harus mengatur sebaik-baiknya teknis dan mekanisme



Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja

hedging valas yang akan dilakukan oleh BUMN."

"Sehingga transaksi hedging tidak disalahgunakan dengan tujuan spekulasi," tegas Bihar.

Sementara itu, Direktur Utama Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Megain Widjaja, mengatakan, BKDI akan mendukung dan siap bekerjasama dengan pemerintah."

"Dari sisi sarana dan prasana, BKDI sudah lengkap. Dan ini menjadi momen untuk mengaktifkan kembali kontrak valas yang sudah ada di BKDI," ujar Megain.

Menurut Megain Widjaja, kontrak valas BKDI belum berjalan karena masih ada keraguan dari pelaku pasar yang disebabkan belum adanya aturan dan mekanisme teknis hedging khususnya bagi BUMN. Sedangkan dari kalangan swasta lebih memilih melakukan hedging valas di pasar luar negeri, karena mata uang yang dimiliki dari hasil ekspor bisa di-eksposure dengan bermacam mata uang lain.

"Jadi kalau sudah ada wacana seperti ini, kami akan jemput bola. BKDI didukung Bappebti siap berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan," tandas Megain Widjaja.



Agenda Foto



Sertijab Eselon II, III dan IV Bappebti



Kepala Bappebti, Sutriono Edi memimpin prosesi serah terima jabatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Bappebti Kemendag, di ruang rapat Kepala Bappebti Kemendag, Jakarta, 14 Juli 2014 lalu.

Serah terima jabatan yang berlangsung adalah dari Sekretaris Bappebti Junaedi yang saat ini menjadi Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen kepada Sri Nastiti Budianti yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Perniagaan. Kepala Biro Perniagaan Sri Nastiti Budianti kepada Pantas Lumban Batu yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa. Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Pantas Lumban Batu kepada Retno Rukmawati yang sebelumnya menjabat Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Esoknya, 15 Juli 2014, Kepala Bappebti, Sutriono Edi juga memimpin prosesi serah terima jabatan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Bappebti Kemendag. Serah terima jabatan yang berlangsung adalah 4 Pejabat Eselon III dan 10 Pejabat Eselon IV di lingkungan Bappebti.

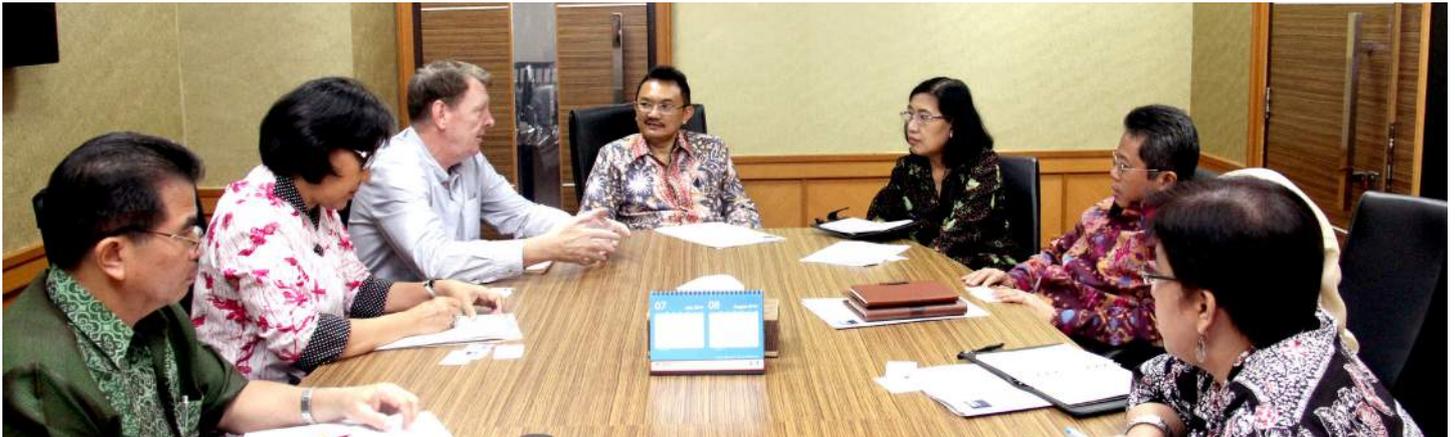
DPRD Bojonegoro Kunjungi Bappebti Bahas SRG

Kepala Bappebti, Sutriono Edi menerima kunjungan Komisi B DPRD Bojonegoro yang dipimpin oleh Ketua Komisi B, Ali Mahmudi, dalam rangka pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG), di Kantor Bappebti, Jakarta, 18 Juli 2014 lalu.

Kunjungan rombongan DPRD Bojonegoro ke Bappebti bermaksud untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappebti terkait dengan upaya percepatan implementasi SRG di Bojonegoro.

Beberapa komoditi pertanian unggulan di Bojonegoro diantaranya adalah padi, jagung dan tembakau. Anggota dewan juga menyampaikan harapannya agar komoditi tembakau dapat menjadi salah satu komoditi yang dapat diresi gudangkan.





Bappebti Jalin Kerjasama dengan AIPEG



Kepala Bappebti, Sutriono Edi didampingi oleh Pejabat Eselon II Bappebti menerima kunjungan Bryan Holford dan Prasasti Sasongko dari *Australian Indonesian Partnership for Economic Governance* (AIPEG), di Kantor Bappebti, Jakarta, 24 Juli 2014 lalu.

Pertemuan tersebut membahas kerjasama antara Bappebti Kemendag dengan AIPEG dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia dan dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Bappebti Kemendag.

Selanjutnya disepakati bahwa pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan kerjasama berupa pendampingan dalam pelaksanaan *capacity building* pegawai Bappebti dan pelaku usaha dibidang PBK dan SRG.

Kepala Bappebti Hadiri PLKA Brebes

Kepala Bappebti Sutriono Edi didampingi oleh Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Retno Rukmawati dan Kepala Biro PERNIAGAAN, Pantas Lumban Batu menghadiri penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes di Pasar Bawang Merah Klampok, Brebes, 17 Juli 2014 lalu.

Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan pertemuan antara Kepala Bappebti dengan Wakil Bupati Brebes, Kadis Perindag dan Kadis Pertanian Kab Brebes, Kepala Cabang Bank BRI Wilayah Brebes serta Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia untuk membahas pengembangan bawang merah di Brebes.





Kemendag Tertibkan Perdagangan Batubara

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara. Ketentuan ini ditetapkan pada 15 Juli 2014 dan efektif mulai berlaku pada 1 September 2014.

"Permendag Nomor 39 Tahun 2014 dilatarbelakangi atas fakta bahwa Batubara adalah produk pertambangan yang tidak terbarukan. Pemanfaatan Batubara harus dipergunakan seoptimal mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta dikelola secara berkelanjutan dengan efisien dan efektif. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan ini adalah untuk mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan, menjamin pemenuhan kebutuhan produk Batubara di dalam negeri, mendukung upaya tertib usaha dan mempermudah penelusuran (traceability) produk pertambangan Batubara, menata kewajiban pembayaran iuran produksi/royalti, serta menciptakan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha tambang," jelas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Partogi Pangaribuan, di Jakarta, Juli 2014 lalu.

Selama kurun waktu 2009-2013, ekspor produk pertambangan Batubara mengalami kenaikan yang sangat

tajam yaitu sebesar 187%. Berdasarkan data rekapitulasi laporan surveyor, jumlah ekspor Batubara pada tahun 2009 sebesar 220 juta ton, sedangkan pada akhir tahun 2013 naik menjadi 413 juta ton.

Lebih lanjut, Partogi menegaskan bahwa ketentuan mengenai ekspor Batubara dan produk Batubara tersebut sejalan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang mengamanahkan agar pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Dalam Permendag Nomor 39 Tahun 2014, produk pertambangan yang diatur tata niaga ekspornya berjumlah 24 nomor pos tarif/HS, yang meliputi Batubara antrasit, bituminous, lignit, kokas, gas Batubara, dan produk turunan lainnya.

Setelah Permendag Nomor 39 Tahun 2014 ini berlaku, maka ketentuan mengenai verifikasi atau penelusuran teknis ekspor Batubara yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Gudang SRG Bengkulu Tepat Untuk Komoditi Kopi

Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan pemerintah daerah telah membangun 1 gudang SRG untuk komoditi kopi yang berlokasi di Desa Tabah Air Pauh, Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Dibangunnya gudang itu, menurut Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Junaedi, merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, Kabupaten Kepahiang memiliki perkebunan kopi Robusta terluas di Provinsi Bengkulu yakni 24.017 hektare, disusul perkebunan kopi di Kabupaten Seluma seluas 16.760 hektare.

"Keseluruhan hasil produksi Kopi Bengkulu (Robusta) tersebut berkisar antara 53.000-55.000 ton per tahun dengan jumlah petani kopi sebanyak 62.970 kepala keluarga. Hasil produksi kopi Bengkulu pernah mencapai 63.757 ton pada tahun 2006," kata Junaedi, saat menghadiri sekaligus membuka acara

sosialisasi SRG di Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Senin (23/6).

Data Kementerian Pertanian, menyebutkan, pada tahun 2010 total produksi kopi Bengkulu sebesar 54.948 ton, yang terdiri dari produksi perkebunan kopi Bengkulu milik rakyat mencapai 54.801 ton dan produksi perkebunan swasta sebesar 147 ton.

Bicara SRG, Junaedi memaparkan, SRG merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan), sebagai suatu instrumen tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditas) yang disimpan di gudang.

Dengan memiliki resi gudang, para pelaku usaha, khususnya petani, kelompok tani, koperasi, serta usaha kecil

dan menengah (UKM) dapat memperoleh kredit di bank tanpa memberikan jaminan atau aset tetap lainnya, seperti tanah, rumah, atau kendaraan bermotor. "Jaminannya adalah resi gudang itu sendiri yang merupakan bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang, sehingga petani tidak perlu menjual hasil panennya langsung pada saat panen raya di mana harga sedang turun," jelasnya.

Junaedi melanjutkan, pembiayaan resi gudang telah dilakukan oleh lembaga keuangan bank seperti BRI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Kalsel, Bank Jateng, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto; maupun lembaga keuangan non-bank, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (KUKM). 



Kemendag Terbitkan Revisi Permendag Tentang Ekspor Timah

Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Timah, Kamis (24/7). Permendag ini merevisi peraturan sebelumnya yaitu Permendag Nomor 78/M-DAG/PER/12/2012 jo. Permendag Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013 Tentang Ketentuan Ekspor Timah. Ketentuan ini berlaku mulai 1 November 2014 dan harus diperbaharui dan disesuaikan paling lambat pada 1 Maret 2015.

"Permendag ini direvisi untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif, mendukung kelancaran ekspor timah, memenuhi kebutuhan bahan baku timah untuk industri dalam negeri, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta pengawasan ekspor timah," jelas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Partogi Pangaribuhan.

Partogi juga menjelaskan isi dari pokok-pokok pengaturan Permendag tersebut, diantaranya:

I. Timah yang diatur dikelompokkan menjadi:

1. Timah Murni Batangan, timah murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9% yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah oleh *Smelter* (Pos tarif/HS 8001.10.00.00);

2. Timah Murni Bukan Batangan, yaitu timah murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,93% dalam bentuk selain batangan atau dalam bentuk lainnya yang berbahan baku timah murni batangan (Pos tarif/HS 8001.10.00.00);

3. Timah Solder, yaitu timah paduan dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99,7% dalam bentuk batangan atau bentuk lainnya yang digunakan untuk menyolder dan mengelas (Pos tarif/HS 8003.00.10.00, ex. 8003.00.90.00, ex. 8311.30.90.10, ex. 8311.90.00.00, ex. 3810.10.00.00); dan

4. Timah Paduan Bukan Solder, yaitu timah paduan dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96% dalam bentuk batangan atau bentuk lainnya yang tidak digunakan



untuk menyolder dan mengelas (Pos tarif/HS 8001.20.00.00, 8007.00.20.00, 8007.00.99.90).

II. Timah yang diekspor harus memenuhi spesifikasi teknis yang terdiri dari:

1. Kandungan Stannum (Sn) dan unsur lainnya;

2. Bentuk dan ukuran bagi timah murni batangan dan timah solder; dan

3. Pencantuman label dan kemasan.

III. Timah Murni Batangan sebelum diekspor wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah

IV. Harga Timah yang terjadi pada saat timah ditransaksikan di Bursa Timah dapat digunakan sebagai dasar penghitungan iuran produksi/royalti. 

KPK Harus Selidiki Ekspor Timah Ilegal

DPRD Bangka Belitung mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menyelidiki potensi kerugian negara dari ekspor timah di Bangka Belitung. Dalam temuan Tim Panja Timah DPRD Bangka Belitung, transaksi timah ilegal selama 2004-2013 sebanyak 301.800 ton dengan nilai sebesar Rp 50,121 triliun. Sedangkan kerugian royalti mencapai Rp 4,17 triliun, dan pajak penghasilan badan yang tidak dibayarkan mencapai Rp 2,667 triliun.

"Kami sudah bertemu dengan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas. Dan dalam pertemuan dengan KPK, kami

menyerahkan hasil temuan Tim Panitia Kerja Timah DPRD Bangka Belitung," jelas Ketua Tim Panitia Kerja Timah DPRD Bangka Belitung, Eka Mulya Putra.

Seperti yang sudah kami jelaskan pada laporan yang disampaikan kepada KPK, tambah Eka, jelas-jelas negara dirugikan dan juga masyarakat di Bangka Belitung.

"Karena kami sudah menyampaikan laporan kepada KPK, maka KPK yang lebih berhak untuk mengusut hingga lebih tuntas tentang potensi kerugian dan pihak-pihak yang terlibat," jelas Eka Mulya Putra. 



Harga Kopi Dunia Stagnan

Panen kopi Brasil yang masih sulit untuk diestimasi khususnya terkait dampak cuaca panas dan kekeringan Brasil sejak awal tahun ini, membuat pergerakan harga kopi sulit untuk ditentukan. Di lain sisi, pengiriman kopi asal Brasil hingga saat ini masih berada dalam kondisi relatif stabil. Selain faktor tren volatilitas, penguatan harga kopi robusta juga terdorong oleh informasi terkait potensi penurunan output kopi arabika Peru.

Sementara itu, jelang libur panjang hari raya Idul Fitri, perdagangan kopi robusta pada minggu ketiga Juli 2014 di JFX, harga kopi berada pada level Rp 23.640 untuk kontrak Juli 2014 dan kontrak September juga naik pada level yang sama kontrak Juli 2014. Sementara itu, di bursa NYSE Liffe London, harga robusta dibuka melemah signifikan. Untuk kontrak Juli 2014 berada pada level US\$ 2.032 per ton atau melemah 0,44 %.

Namun hingga pada perdagangan akhir Juli 2014, harga kopi robusta tampaknya masih berlanjut reli. Di bursa Liffe, terpantau harga kopi berada pada posisi menguat untuk kontrak pelepasan September 2014 atau terdongkrak sekitar 0,15 % ke tingkat harga US\$ 2.037/ton. Penguatan harga kopi robusta itu dipicu masih cukup kuatnya sentimen positif dari turunnya hujan di Brasil yang mengganggu proses panen di beberapa perkebunan kopi di Brasil. Sentimen positif yang masih cukup kuat dari turunnya hujan di perkebunan kopi Brasil, terpantau memicu harga kopi Arabika untuk kembali menguat setelah sempat melemah pada Selasa lalu. Curah hujan di Brasil tersebut, mendorong harga kopi untuk menguat akibat terjadinya perlambatan masa panen di Brasil. Selain itu, faktor dorongan sentimen negatif dari curah hujan di Brasil membuat harga kopi robusta dan arabika juga terangkat oleh aksi beli oleh para investor. 

Harga Karet di Pasar Spot Bergerak Naik

Secara umum, pergerakan harga karet sepanjang Juli 2014 di bursa berjangka dan spot internasional serta di tanah air, bergerak naik dengan tren fluktuatif. Di bursa Singapura pada awal Juli, harga berada pada level US\$ 174,3 sen per kg. Sedangkan harga karet di pasar spot Palembang, yang dijadikan acuan pasar fisik nasional berada pada level Rp 18.508 per kg.

Hingga pada akhir pekan keempat Juli 2014, atau jelang libur dan cuti nasional, harga karet di dalam negeri mulai bergerak stagnan. Di pasar spot Palembang, harga berada pada level Rp 17.709 per kg atau naik dibanding akhir pekan sebelumnya pada level Rp 17.549 per kg. Demikian juga di bursa karet Singapura, tercatat harga pada level US\$ 168,8 sen per kg untuk kontrak Agustus 2014. Sedangkan di bursa Tocom, harga sedang mengalami pergerakan melemah dipicu oleh aksi *wait and see* para investor terhadap pergerakan kontrak karet untuk bulan Juli.

Pelemahan harga Tocom itu disebabkan data industri Jepang yang mengalami pelemahan secara MoM terpantau memicu tekanan harga karet. Rilis data yang menunjukkan produksi Industri Jepang yang turun dari level 0,7 % ke level - 3,3 % mengindikasikan sektor industri Jepang yang lesu. Imbas dari hal tersebut, harga karet mengalami pelemahan akibat potensi pelemahan demand dari sektor industri Jepang. 

Produksi Menurun, Harga Lada Melonjak

Harga komoditas lada andalan Provinsi Bangka Belitung sejak pekan ketiga Juli 2014 terus melonjak naik. Berdasarkan informasi Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI) Babel, harga lada mencapai Rp 130.000 per kg. Kenaikan harga lada kali ini di luar kelaziman, pasalnya harga lada pada tahun-tahun sebelumnya biasanya menjelang lebaran mengalami penurunan.

Kenaikan harga ini dipicu tertekannya jumlah produksi. Bahkan ekspor lada pada tahun 2014 terancam tak mencapai target, dipicu turunnya produksi dalam negeri akibat tingkat curah hujan tinggi. Data AELI juga menunjukkan produksi di seluruh daerah penghasil lada di Tanah Air, terutama Bangka-Belitung dan Lampung, akan terganggu. Lampung sebagai produsen utama lada hitam diprediksi memproduksi 15.000 ton dari jumlah normal produksi 30.000 ton.

Sementara itu harga lada di bursa London, untuk lada hitam masih berada pada level US\$ 8.300 per ton dan lada putih berada pada level US\$ 11.700 per ton. Seiring dengan itu, harga lada putih di pasar spot Pangkalpinang pada minggu ketiga Juli berada pada

level Rp 123.110 per kg dan lada hitam naik pada level Rp 75.749 dari sebelumnya Rp 75.657 per kg.

Sementara itu, di tengah kenaikan harga lada di pasar dunia, Vietnam sebagai salah satu negara produsen utama lada, harga lada domestiknya telah mencapai tingkat tertinggi yang pernah terjadi, yaitu pada level VND 120.000 atau kisaran US\$ 5,7 per kg. Kenaikan harga lada itu sebagian dipicu kekurangan stok di pasar dunia. Pada akhir Juni 2014, harga ekspor lada hitam adalah US\$ 4.456 per ton, meningkat dari tahun ke tahun lebih dari US\$ 600, sedangkan lada putih telah meningkat kuat lebih dari US\$ 3.000 per ton menjadi sekitar US\$ 7.000 per ton.

Menurut VPA- asosiasi lada Vietnam, output lada Vietnam untuk tahun ini diperkirakan mencapai 100.000-110.000 ton. Vietnam mengeksport 25.000 ton lada pada kuartal pertama, dengan pendapatan US\$ 123 juta dan pertumbuhannya hampir 45 % dari tahun ke tahun. 



PT Timah production increased 40.89 %

PT Timah Tbk, recorded 14,352 tons tin ore production on 2014 first semester or 89% increase compared with same period in 2013 for 10,187 tons. In the meantime, tin price on the first semester in 2014 also increased approximately USD 23,193 per ton.

This was one of points said by The company secretary of PT Timah, Agung Nugroho to Press in Jakarta recently. "Tin production until 30th of June 2014 is also increased for 12.42% became 10,808 tons compares with same period in 2013 for 9,613 tons. For tin trading on last year first semester recorded 11,7% decrease to 9,663 tons from 10,951 tons last year," He said.

The average selling price on 2014 first semester is US 23,193 tons, while on same period in 2013 is US 22,565 per ton. According to him, the arrangement of tin supply amount for trading at BKDI tin exchanges is a business strategy to maintain price stabilization. Agung is also added that tin production until 30th of June 2014 was generated from land mining is 4,823 tons and sea mining 9,528 tons. Meanwhile, the ore product composition on 2013 first semester were land 1,463 tons and sea 8,724 tons.

For the supply, until the end of 2014 first semester, we have 2,604 tons of tin ore, 8,814 tons of in process goods, 4,473 tons of tin metal, and 20 tons of tin solder. While the position on the last semester in 2013 were 1,705 of tin ore, 4,574 tons of in process goods, 1,297 tons of tin metal and 98 tons of tin solder.



Meat warehouse receipt, is it possible?

Warehouse Receipt system is one of the instruments that can handle food problems for Jakartans. Even though Jakarta has no agricultur and livestock field, as the biggest market and trading barometer of those two sectors in Indonesia, it has big chance to implement Warehouse Receipt System.

According to Managing Director of PT Food Station Tjipinang Jaya, Dwi Ananto to margind.com recently, the Warehouse receipt system implementation approach was based on production. "We will make it around as we will implement the warehouse receipt system based on market. So the beef meat seller will become the business people."

"We were optimist that the meat warehouse receipt system will be optimistic and became the solution of meat scarcity in DKI Jakarta. Do you know why? Because Jakartans needs 150 tons of beef meat everyday or about 1,500 cows per day," Dwi Ananto explained.

Moreover Dwi said that as per calculation, safe supply for consumption in DKI Jakarta for a week is about 1,050 tons of meat or about 1 million cows per week.

"Then the question is, how we can fulfill that needs and how can people with middle to low income can afford the price?" Dwi said.

The most effective and efficient way is cow warehouse receipt. "We can be the one responsible for the implementation of warehouse receipt system, so are the state-owned enterprises in DKI Jakarta" Dwi explained.

The other advantage of cow warehouse receipt system is that we do not necessarily need the cow to be delivered to Jakarta we only need the frozen beef meat to be delivered here so Jakarta will be free of cow waste. Moreover it will open employment outside Jakarta.

The country revenue from tin royalty is increased

Tin exchange that has been operated since 30th of August 2013 until 30th of June 2014 and has contribute USD 4,818,021 income to the country, which is equal with 55 billion with exchange rate of IDR 11,500 per USD. This income royalty is increased compare with time before BDKI tin exchange has not been established.

According to President Commissioner of Indonesian Commodity and Derivative exchange (BDKI), Fenny Widjaja, before tin exchange was established, the country only gained royalty for USD 593.85 per ton but in recent time it was increased to USD 695.10 per ton. "So there is profit deviation for USD 101.25 per ton for income royalty of the country."

The same thing is also happened on smelter company. In the past, smelter company only afford to sell tin on USD 19,795 per tons. After tin exchange is existed, the tin price reached USD 23,175 per ton. "The profit deviation reached USD 3,375 per ton and in total is USD 160,600.700," Fenny said.

Meanwhile, the tin transaction volume in BKDI tin exchange for the period of 30th of August 2013 – 31st of December 2013 reached 18,290 tons. While for period of 1st of January 2014 – 30th of June 2014 reached 29,225 tons. The tin export volume itself for period of 30th of August 2013 – 31st of December 2013 reached 18,080 tons. While for period of 1st of January 2014 – 30th of June 2014 reached 27,190 tons.



PENERBITAN RESI GUDANG BULAN MEI 2014

NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Penerbitan				Nilai Barang (Rp)
		Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Harga (Rp/Kg)	
1.	PT. PERTANI					
	- Probolinggo (Banyuanyar) *	Gabah	1	200	4.400	880.000.000
	- Probolinggo (Krasan) *	Gabah	2	257	4.400	1.130.800.000
	- Malang *	Gabah	2	70	5.000	349.000.000
	- Indramayu (Tukdana)	Gabah	41	485	5.775	2.802.840.000
	- Indramayu (Haurgeulis)	Gabah	24	532	5.682	3.023.000.000
	- Sidrap	Beras	2	200	6.700	1.340.000.000
		Gabah	1	78,75	4.500	354.375.000
2.	KOPERASI NIAGA MUKTI					
	- Cianjur *	Gabah	11	298	6.287	1.871.530.000
3.	PT. Pos Indonesia					
	- Tasikmalaya *	Gabah	2	20	5.000	100.000.000
4.	KSU ANNISA					
	- Subang *	Gabah	11	154	7.000	1.078.000.000
Jumlah		Gabah	82	1921	5.149	10.411.545.000
Total		Beras	2	200	6.700	1.340.000.000
			84	2.121		11.751.545.000

PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN MEI 2014

NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Penerbitan			Pembiayaan		
		Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Nilai Barang (Rp)	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)	Bank/LKNB
1.	PT. PERTANI						
	- Probolinggo (Banyuanyar) *	Gabah	1	880.000.000	-	-	-
	- Probolinggo (Krasan) *	Gabah	2	1.130.800.000	-	-	-
	- Malang *	Gabah	2	349.000.000	-	-	-
	- Indramayu (Tukdana)	Gabah	41	2.802.840.000	26	1.950.000.000	Bank BJB
	- Indramayu (Haurgeulis)	Gabah	24	3.023.000.000	5	372.800.000	Bank BJB
	- Sidrap	Beras	2	1.340.000.000	-	-	-
		Gabah	1	354.375.000	-	-	-
2.	KOPERASI NIAGA MUKTI						
	- Cianjur *	Gabah	11	1.871.530.000	13	1.309.970.000	Bank BJB
3.	PT. Pos Indonesia						
	- Tasikmalaya *	Gabah	2	100.000.000	2	70.000.000	Bank BJB
4.	KSU ANNISA						
	- Subang *	Gabah	11	1.078.000.000	8	542.000.000	Bank BJB
Jumlah		Gabah	82	10.411.545.000	44	3.632.770.000	
Total		Beras	2	1.340.000.000	0	-	
			84	11.751.545.000	44	3.632.770.000	

Sumber: BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI



NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG BULAN MEI 2014

NO.	Wilayah	Nilai Transaksi Periode Mei 2014 (Rp.)	Nilai Transaksi Mei 2013 (Rp.)	Nilai Transaksi Jan-Mei 2014 (Rp.)
1.	Sumatera Barat	1.377.700.000	477.260.000	7.003.522.500
2.	Jambi	1.946.432.000	2.155.000.000	5.639.241.000
3.	Lampung	267.300.000	Nihil	430.100.000
4.	Jawa Barat	11.129.950.000	13.634.250.000	33.196.575.000
5.	Jawa tengah	Nihil	10.739.500.000	58.199.440.000
6.	Yogyakarta	9.396.400.000	12.099.700.000	50.582.700.000
7.	Jawa timur	7.281.250.000	33.097.000.000	92.635.650.000
8.	Bali	Nihil	10.868.000.000	0
9.	NTB	Nihil	3.586.250.000	23.663.600.000
10.	Sulawesi Utara	17.274.367.000	Nihil	30.130.667.000
11.	Sulawesi Selatan	1.820.950.000	Nihil	4.077.950.000
12.	Sulawesi Tenggara	1.675.900.000	2.780.000.000	7.285.700.000
13.	Gorontalo	754.000.000	5.847.400.000	754.000.000
14.	PT iPASAR Indonesia	65.000.000	401.198.000	130.000.000
15.	Pasar Fisik CPO	Nihil	Nihil	0
TOTAL		52.989.249.000	95.685.558.000	313.729.145.500

Sumber: Bappebti

PENYELENGGARAAN DAN NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG SPOT PERIODE MEI 2014

Komoditas	Penawaran Mei 2014	Transaksi Januari - Mei 2014	
	Kuantitas	Kuantitas	Nilai (Rp)
Jati	0	0	0
Mahoni	0	0	0
Jagung	80.000 Kg	40.000 Kg	130.000.000
Rumput Laut	0	0	0
Kopi	114.000 Kg	0	0
Gondorukem	1.690 Ton	0	0
TOTAL NILAI TRANSAKSI			130.000.000

Sumber: PT iPASAR, data diolah



Pengembangan SRG Hingga 2025

Pengantar Redaksi; Tahun 2014 jumlah gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang dibangun pemerintah mencapai sebanyak 117 di 102 kabupaten. Dengan bertambahnya jumlah gudang tersebut, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti sebagai lembaga pengawas dan

pembina, menyusun berbagai program yang menjadi acuan dan pencapaian yang diharapkan setiap tahunnya. Program pengembangan SRG itu telah dimulai sejak tahun 2014 hingga tahun 2025. Berikut ini pengembangan SRG hingga tahun 2025;

PENGEMBANGAN SRG JANGKA PENDEK (2014-2015)



Proyeksi total nilai Resi yang diterbitkan sampai periode ini adalah Rp. 571,5 milyar dengan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non-bank sebesar Rp. 348,7 milyar;

- Pembentukan dan Optimalisasi Tim Kelompok Kerja SRG
- Melakukan percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga yang Melaksanakan Fungsi, Tugas, Kewajiban dan Wewenang Lembaga Jaminan Resi Gudang,
- Penyimpanan komoditas unggulan daerah dengan spesifikasi sesuai dengan kontrak pada perdagangan berjangka (Kopi dan Kakao);
- Mempersiapkan calon Pengelola Gudang SRG baru dengan bekerjasama dan melatih BUMN, BUMD maupun Koperasi;
- Melibatkan pelaku usaha aktif ataupun asosiasi komoditas di tingkat daerah maupun nasional;
- Menambah nilai ekonomis komoditi yang disimpan di gudang SRG dengan menambah fasilitas Rice Milling Unit.
- Sosialisasi dan Edukasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD, Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi Komoditas maupun Pelaku Usaha;
- Mensinergikan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang melalui transaksi Resi Gudang di penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;



PENGEMBANGAN SRG JANGKA MENENGAH(2016-2019)

1. Harmonisasi peraturan dan ketentuan yang terkait dengan PBK, SRG dan PLK guna membangun keterkaitan antara ketika pilar tersebut;
2. Pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang yang bertugas mengelola Dana Jaminan Sistem Resi Gudang sebagai lembaga yang independen dan berdiri sendiri.
3. Pengembangan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011;
4. Mewujudkan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait dengan ketahanan pangan nasional melalui sistem informasi ketersediaan pangan yang terintegrasi.

2016 2019

Proyeksi total nilai Resi yang diterbitkan sampai periode ini adalah Rp. 1,4 triliun, dengan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non-bank sebesar Rp. 855,1 milyar;

PENGEMBANGAN SRG JANGKA PANJANG(2020-2025)

1. Menstimulasi terwujudnya keterkaitan transaksi komoditas fisik di tiga pilar instrumen perdagangan, yaitu PBK, SRG dan PLK;
2. Pengembangan komoditi dalam SRG untuk seluruh komoditas fisik yang diperdagangkan di Bursa, tidak terbatas pada komoditas pertanian;
3. Perluasan jaringan Gudang SRG mencakup gudang-gudang komoditas pokok yang tersebar di seluruh wilayah nusantara sehingga dapat memantau ketersediaan stok komoditas khususnya pangan secara nasional.
4. Sosialisasi dan Edukasi serta penegakan hukum berkelanjutan dalam rangka menjaga integritas dan terus mengembangkan pelaksanaan SRG;

2020 2025

Proyeksi total nilai Resi yang diterbitkan sampai dengan tahun 2025 adalah Rp. 5,8 triliun. Pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non-bank sebesar Rp. 3,57 triliun;

Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui Tentang CFD



Contract for Difference (CFD) adalah sebuah kontrak antara dua pihak, biasanya digambarkan sebagai “pembeli” dan “penjual,” yang menetapkan bahwa penjual akan membayar kepada pembeli selisih antara nilai sekarang dari suatu aset dan nilainya pada masa kontrak.

CFD pada awalnya dikembangkan di awal 1990-an di London sebagai jenis *equity swap* yang diperdagangkan dengan marjin. CFD diperkenalkan secara luas oleh Brian Keelan dan Jon Wood. Mereka adalah *hedge fund manager* di pasar saham London Stock Exchange. Motivasi Brian Keelan dan Jon Wood, menciptakan perdagangan CFD selain meringankan modal yang dibutuhkan dan juga menghindari pajak yang tinggi dari pemerintahan Inggris.

Saat ini diketahui sejumlah negara telah memperdagangkan CFD seperti di Australia, Austria, Kanada, Prancis, Jerman, Hong Kong, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Belanda, Luksemburg, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki dan Selandia Baru. Sedangkan di Amerika Serikat, otoritas perda-

gangan- Securities and Exchange Commission (SEC), tidak memperkenankan CFD diperdagangkan di bursa.

Pada praktiknya, CFD diperdagangkan antara pedagang individu dan penyedia CFD. Sehingga tidak ada ketentuan kontrak standar untuk CFD, dan setiap penyedia CFD dapat menentukan sendiri spesifikasi kontrak, tetapi mereka cenderung memiliki sejumlah kesamaan.

CFD dimulai dengan membuat pembukaan perdagangan pada instrumen tertentu dengan penyedia CFD. Ini menciptakan posisi dalam instrumen itu. Tidak ada tanggal kadaluarsa. Setelah posisi ditutup, perbedaan antara pembukaan perdagangan dan perdagangan penutupan dibayar sebagai laba atau rugi. Penyedia CFD dapat membuat sejumlah tuduhan sebagai bagian dari perdagangan atau posisi terbuka. Ini mungkin termasuk, *bid-offer spread*, komisi, pembiayaan semalam dan biaya manajemen *account*.

Meskipun CFD tidak berakhir, apapun posisi yang dibiarkan terbuka semalam akan ‘diperpanjang’. Ini biasanya berarti bahwa setiap keuntungan dan kerugian direalisasikan dan dikreditkan

atau didebet ke rekening klien dan beban keuangan apapun akan dihitung. Posisi kemudian membawa maju ke hari berikutnya. Norma industri adalah bahwa proses ini dilakukan pukul 22.00 waktu Inggris.

CFD diperdagangkan dengan menggunakan margin, dan pedagang harus mempertahankan tingkat margin minimum setiap saat. Sebuah fitur khas perdagangan CFD adalah bahwa laba rugi dan persyaratan margin dihitung terus-menerus secara *real time* dan ditampilkan kepada pedagang di layar. Jika jumlah uang yang disetorkan dengan broker CFD turun di bawah level margin minimum, maka akan diminta untuk menambah margin.

Kelemahan CFD

Bagi pihak bursa dan lembaga kliring, perlu mempersiapkan sejumlah sistem perdagangan yang terintegrasi namun tidak membebankan biaya yang tinggi kepada para pelakunya. Di samping itu, harus dibuat sebuah aturan dan persyaratan yang ketat.

Di bursa saham Australia, jumlah produk CFD yang diperdagangkan relatif lebih kecil atau tidak semua produk saham dijadikan CFD. Di samping itu, pihak otoritas tidak memperkenankan bursa untuk memperdagangkan CFD saham dari negara lain.

Beberapa komentator keuangan dan regulator telah menyatakan keprihatinan tentang cara CFD dipasarkan oleh pedagang baru dan belum memiliki pengalaman sebagai penyedia CFD. Hal itu dikatakan karena saat melakukan penawaran yang disampaikan pedagang hanya potensi keuntungan, sedangkan risikonya tidak. Oleh sebab itu, sebagai antisipasi dan respon terhadap kekhawatiran ini, regulator harus mempersyaratkan pihak yang akan bertransaksi CFD memiliki keuangan yang mencakup dan memberi peringatan bahwa transaksi CFD memiliki



risiko tinggi.

Seperti halnya di Inggris, pihak otoritas menetapkan aturan bahwa setiap penyedia CFD harus memiliki sejumlah persyaratan yang ditentukan FSA. Sedangkan di Australia, otoritas bursa- ASIC di situs-nya mengingatkan semua pihak bahwa perdagangan CFD lebih berisiko dibandingkan kasino dan pasar taruhan balapan kuda.

Ada juga kekhawatiran bahwa CFD yang sedikit lebih dari perjudian menyiratkan bahwa sebagian besar pedagang kehilangan CFD perdagangan uang. Tidak mungkin untuk mengkonfirmasi apa pengembalian rata-rata berasal dari perdagangan karena tidak ada statistik yang dapat diandalkan yang tersedia dan penyedia CFD tidak mempublikasikan informasi tersebut. Namun harga CFD didasarkan pada publik yang tersedia instrumen yang mendasari dan peluang tidak ditumpuk terhadap pedagang sebagai CFD hanya perbedaan harga yang mendasarinya.

Selain itu, ada juga beberapa kekhawatiran bahwa perdagangan CFD kurang transparan seperti yang terjadi pada perdagangan OTC- *over the counter* karena tidak ada kontrak yang standar.

Manfaat

Meski memiliki risiko tinggi, perdagangan CFD tetap saja diminati banyak pihak karena sejumlah manfaat yang dapat dipetik, seperti;

1. Pasar yang mandiri. Untuk mencapai pasar yang mandiri, pihak bursa harus memastikan pasar yang wajar, teratur, dan transparan. Di Australia, ASX melakukan pengawasan dan memantau perdagangan CFD dengan ketat. Di samping itu, semua produk CFD yang diperdagangkan mendapat persetujuan dari ASX.
2. Transparansi. ASX mendapat laporan atas semua transaksi CFD baik berupa posisi terbuka maupun jumlah volumenya.
3. *Counterparty risk*. Semua kewajiban penyelesaian akan dijamin oleh lem-

baga kliring- SFE Clearing Corporation (SFECC). Lembaga kliring pun termasuk pihak yang diawasi *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC) dan *Reserve Bank of Australia* (RBA).

Perbedaan

1. *Futures*. Produk futures lebih disukai para profesional dibandingkan produk CFD berupa indeks ataupun suku bunga. Hal itu dikarenakan produk-produk futures lebih matang dari sebuah bursa berjangka. Keuntungan CFD dibandingkan dengan futures adalah bahwa ukuran kontrak lebih kecil sehingga lebih mudah diakses oleh pedagang kecil dan harga yang lebih transparan. Produk kontrak berjangka memiliki masa jatuh tempo, sedangkan produk-produk CFD tidak akan pernah ada masa kadaluwarsanya. Namun demikian, bursa berjangka juga dijadikan oleh penyedia CFD untuk melindungi posisi mereka sendiri.
2. *Option*. Seperti pada futures, *option* merupakan produk yang sudah mapan dari sebuah bursa berjangka, dan banyak digunakan oleh para profesional. *Option* juga seperti futures, digunakan untuk lindung nilai risiko atau mengambil risiko untuk berspekulasi. Keuntungan utama dari CFD atas option adalah kesederhanaan harga dan berbagai instrumen yang mendasari.
3. *Waran Covered*. Serupa dengan opsi, waran telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir sebagai cara untuk berspekulasi pada pergerakan pasar. Biaya CFD yang cenderung lebih rendah untuk jangka pendek dan memiliki jangkauan yang lebih luas dari produk yang mendasari. Seperti Singapura, beberapa broker telah gencar mempromosikan CFD sebagai alternatif waran, dan mungkin sebagian bertanggung jawab atas penurunan volume waran.
4. *Exchange-traded funds*- ETF. ETF sama halnya dengan CFD dapat digunakan untuk spekulasi jangka pendek, dan tersedia melalui berbagai macam produk yang mendasarinya. Diantaranya produk ETF yakni, indeks, komoditas dan penyaluran amanat luar negeri- *overseas markets*, yang telah dianggap sebagai salah satu kekuatan dari CFD. Dibandingkan dengan CFD, ETF merupakan produk yang diperdagangkan di bursa dan telah lebih lama dan merupakan produk yang lebih matang. Seperti produk yang diperdagangkan di bursa lain, biaya lebih tinggi dan akses adalah melalui broker tradisional.
5. Pasar Saham, komoditas dan forex. Ini adalah cara tradisional untuk perdagangan pasar keuangan, ini memerlukan hubungan dengan broker di setiap negara, memerlukan membayar biaya broker dan komisi dan berurusan dengan proses settlement untuk produk tersebut. Dengan munculnya broker diskon, ini telah menjadi lebih mudah dan lebih murah, tetapi masih bisa menantang bagi pedagang eceran terutama jika perdagangan di pasar luar negeri. Tanpa pengaruh ini bersifat padat modal karena semua posisi harus dibiayai penuh. CFD membuatnya lebih mudah untuk mengakses pasar global untuk biaya yang jauh lebih rendah dan lebih mudah untuk bergerak masuk dan keluar dari posisi cepat. Semua bentuk margin trading melibatkan biaya pendanaan, pada dasarnya biaya pinjaman uang untuk seluruh posisi. Ini dibebankan setiap hari untuk semua posisi terbuka dan membuat CFD nyaman jika digunakan di bawah sekitar 10 minggu, titik di mana diperkirakan biaya pendanaan CFD melebihi biaya pembiayaan untuk saham, tetapi lebih mahal untuk posisi jangka panjang (dikutip dari berbagai sumber)



Ichwan Hartanto:

Jadi Pialang Harus Taat Aturan

Dua kali Ichwan melewati Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Saat itu, pandangannya terbentur baliho besar bertuliskan 'Magna'. Kata yang memiliki arti 'besar' itu, rupanya menginspirasi Ichwan Hartanto. Maka jadilah PT Magna Dana Investama Berjangka.

Ini adalah awal kisah mengapa Ichwan menamai perusahaan pialang yang didirikannya menjadi PT Magna Dana Investama Berjangka (MDIB). "Tepatnya di tahun 2005, saya bersama tiga orang teman mendirikan perusahaan ini," kenang Ichwan yang memiliki nama lengkap Ichwan Hartanto, kepada **Buletin Bappebti**, di kantor MDIB, Jakarta, Juli 2014 lalu.

Ketika itu, Ichwan pun langsung menjabat sebagai Direktur Utama PT MDIB. Tentu bukan tanpa alasan dia berani memegang jabatan ini. Industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) telah dikenalnya sejak dia bergabung di sebuah perusahaan *commission house* sebagai marketing pada tahun 1998.

Berbagai posisi jabatan sudah dia rasakan, mulai dari manajer marketing hingga kepala divisi marketing. "Dengan bekal pengalaman sudah ada, saya

memutuskan untuk membuat perusahaan pialang," ceritanya. "Sengsara juga merintis perusahaan ini, lima bulan berturut-turut tidak dapat gaji, tetapi uang keluar terus," tambahnya sambil tertawa lebar.

Ada satu hal yang dijunjung Ichwan dalam menjalankan kepemimpinannya. Yakni, semua orang yang bernaung di MDIB harus mentaati peraturan. Baik itu Undang-Undang PBK maupun peraturan dari otoritas—Bappebti.

Prinsipnya, 'sepatat ingin banyak uang, tapi bisa tidur nyenyak'. Baginya, buat apa memiliki uang banyak, tapi dihasilkan dengan cara yang tidak sesuai aturan. Karena itu, dia selalu mengajak rekan kerja dan karyawannya untuk mengikuti peraturan secara benar.

"Lantaran transaksinya aneh, saya pernah menolak uang nasabah yang ingin bertransaksi sebesar Rp 300 juta.

Saya tidak mau ambil risiko," tegas mantan atlet karate Jawa Tengah ini berbagi pengalamannya. "Konsekuensinya, meski keuntungan perusahaan tidak besar, tapi saya yakin *growth*-nya tetap ada."

Untuk menerapkan 'taat aturan' itu, di internal MDIB dia berusaha menjadi sosok pemimpin yang bersahabat. "Saya mencoba kepada marketing, manager dan lainnya untuk lebih dekat serta menjadi kawan yang baik buat mereka. Dengan kedekatan itu, saya dapat mengarahkan mereka," kata pria yang memiliki motto hidup 'Seribu kawan terlalu sedikit, dan satu musuh terlalu banyak'.

Pria kelahiran Semarang, 4 Juli 1972, ini, menilai, jika semua perusahaan pialang di Indonesia taat aturan, maka citra industri PBK bakal lebih positif. Meski demikian, ia juga menyalahkan nasabah yang kerap mencari masalah. "Nasabahl-

ah yang sering yang mencari masalah, bukan pialang. Kalau pialang mau nakal itu udah bukan zamannya lagi. Sekarang izin dan pengawasan terhadap perusahaan pialang sudah sangat ketat. Jadi, bunuh diri namanya kalau masih mau nekat langgar aturan.”

Investasi Menarik

Di sisi lain, dia juga memberikan saran kepada pemerintah. Dia berpendapat, pemerintah hendaknya jangan mengkondisikan bahwa investasi produk PBK sesuatu yang merugikan. “Pemerintah tanpa disadari menanamkan image PBK kepada masyarakat, bahwa ini adalah produk yang eksklusif, hanya orang berduit yang mau investasi, karena risikonya besar.”

Jika imej itu sudah tertanam, akan sulit bagi produk PBK untuk berkembang. Imbasnya, pialang akan sulit untuk berkembang. Harusnya, kata Ichwan, pemerintah harus mensosialisasikan bahwa produk PBK adalah investasi yang menarik. Di mana setiap investor dapat mengalami keuntungan dan juga kerugian.

“Jadi, bukannya menakuti masyarakat dengan mengatakan investasi PBK investasi yang berisiko. Bicara risiko, semua sektor investasi pasti ada risikonya.”

Ketika mendapat izin operasional, MDIB hanya aktif melakukan transaksi Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN). Produknya yaitu *japanese market*. Saat itu, MDIB belum tertarik memperdagangkan produk SPA (sistem perdagangan alternatif). Padahal, Bappebti telah melegalkan produk SPA pada tahun 2005 silam dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 55 Tahun 2005.

Sebagai member Jakarta Futures Exchange (JFX), hal itu tentu menjadi pertanyaan dari pihak bursa. Dia bilang, pada tahun 2007, JFX sempat memanggil dirinya dan mempertanyakan masalah itu. “*Kamu ini aneh, banyak pialang yang berebutan untuk bertransaksi SPA. Tapi kamu punya fasilitas ke sana kok gak dipakai?*” kata Iwan menirukan pertanyaan dari pihak JFX.

Barulah di tahun 2007 itu, MDIB mulai belajar dan memperdagangkan produk SPA. Produk PALN pun ditiadakan. Untuk kontrak multilateralnya, MDIB saat ini aktif memperdagangkan produk emas. “*Kita dulu sempat berdagang produk olein, tapi sekarang sudah tidak lagi,*” terang alumni Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi ini.

Butuh Kantor Cabang

MDIB tercatat pernah memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Tapi dalam perjalanannya, beberapa kantor cabang itu telah ditutup. Kini MDIB hanya memiliki kantor cabang di Surabaya, Bandung dan Solo.

Tutupnya beberapa kantor cabang MDIB itu sempat juga disayangkan oleh Ichwan. Pasalnya, Bappebti telah mengeluarkan aturan bahwa sejak 15 Maret 2014 hingga 2 tahun ke depan, pembukaan kantor cabang pialang berjangka peserta SPA tidak lagi diperbolehkan. “Saya tidak mengira akan ada kebijakan moratorium itu, kalau tahunya seperti ini, bakal saya pertahankan kantor cabang yang dulu sudah ada,” sesal pria yang hobi makan dan memiliki berat badan 110 kg ini.

Padahal, dia menyadari, perusahaan pialang sangat membutuhkan kantor cabang jika ingin mengembangkan usahanya. Secara teori, memang kebutuhan kantor cabang tidak terlalu penting di era digital saat ini. Tapi, tipikal masyarakat Indonesia, kata dia, kalau di kotanya tidak ada cabang dari perusahaan pialang, mereka tidak akan mau berinvestasi.

“Tidak mungkin kami mau besar dengan hanya mengandalkan online trading. Karena dengan banyaknya kantor cabang, imej perusahaan makin besar dan akan menyerap tenaga kerja di daerah,” ungkapnya. Karena itu, dia berharap, agar pihak otoritas dapat merubah kebijakan yang mengatur monotorium pembukaan kantor cabang perusahaan pialang.



Nyaman

Industri PBK telah digeluti Ichwan sejak lama. Sejak dulu dan hingga kini, dia tetap fokus dan setia berkarir dalam dunia pialang berjangka. “*Jika ingin menekuni bidang lain, pastinya membutuhkan waktu, makanya saya tetap menekuni bidang ini. Dan sekarang saya sudah merasakan manfaatnya,*” ungkapnya sumringah.

Bahkan Ichwan memiliki satu penilaian yang menarik terhadap industri PBK. Katanya, “Bidang yang pergerakan keuangannya sangat cepat dan tepat, ya di industri ini.”

Meski demikian, secara pribadi ada satu hal yang mengganjal menurut ayah dari tiga orang putri ini. “Hemat saya, perusahaan pialang belum bisa diwariskan kepada anak saya, karena belum tentu dia menyukai bidang ini. Jika harus diserahkan kepada profesional, maka karakter perusahaan biasanya akan berubah.”

Kesimpulannya, umur perusahaan pialang hanya sebatas umur si pemilik perusahaan. “*Kalau si pemilik sudah tidak ada, kebanyakan perusahaannya ditutup atau di jual,*” pungkas Ichwan. 

Selamat
Hari Raya

aidilfitri

1 Syawal 1435

Mohon Maaf Lahir & Batin

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - Bappebti
www.bappebti.go.id